

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh :
Rika Harini
Sri Rum Giyarsih
Sri Rahayu Budiani

Staf Pengajar Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

INTISARI

Tantangan pembangunan dimasa depan adalah terwujudnya masyarakat yang adil termasuk keadilan dan pemerataan antar daerah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan pembangunan sektoral yang bertumpu pada pembangunan pusat-pusat pertumbuhan, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan utama yang perlu adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas daerah sesuai dengan potensi ekonomi dan sektor-sektor unggulan wilayah dikembangkan. Selain itu program-program pembangunan ditekankan pada penciptaan kerja baik pada sektor pertanian maupun non pertanian.

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui sektor unggulan dan pertumbuhannya serta bagaimana penyerapan tenaga kerja dari masing-masing sektor perekonomian. Lokasi penelitian Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data runtun waktu (times series) antara tahun 1993-2001 berupa data PDRB dan data ketenagakerjaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antar kabupaten/kota memiliki sektor unggulan yang berbeda-beda. Sektor pertanian (sektor primer) menjadi sektor unggulan pada Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul. Sedangkan di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang menjadi sektor unggulan hanya pada sektor sekunder dan tersier. Sektor industri pengolahan; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menjadi sektor unggulan di Kabupaten Sleman. Sedangkan di Kota Yogyakarta sektor listrik, gas dan air bersih; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa.

Pada Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang lambat jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Semua kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki penyerapan tenaga kerja paling tinggi pada sektor pertanian, sedangkan untuk Kota Yogyakarta yang paling tinggi penyerapan tenaga kerjanya adalah sektor jasa.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada kabupaten / kota dalam mengembangkan fungsi pelayanan yang dapat menumbuhkan keadilan bagi masyarakat, pemberdayaan, dengan tujuan agar masyarakat bisa mandiri, pembangunan agar tercapai kemakmuran dan pembinaan jaringan bisnis untuk mengembangkan dunia usaha (Widodo, 2003). Keberhasilan otonomi tersebut dipengaruhi oleh adanya usaha-usaha optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah, kekayaan alam, sumberdaya manusia dan kondisi sosial ekonomi serta latar belakang budaya. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggerakkan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah dan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang pembangunan ekonomi daerah.

Kriteria keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan berbagai metode, dan yang paling umum dan paling banyak digunakan adalah dengan menganalisa struktur dan perkembangan PDRB suatu daerah dari tahun ke tahun sehingga dapat diketahui sektor unggulan di wilayah tersebut. Sektor unggulan mempunyai peranan sebagai penggerak utama dimana efek multiplier yang ditimbulkan dapat mendominasi perekonomian suatu daerah, sehingga mencapai tingkat pertumbuhan tertentu yang diharapkan. Penelitian mengenai sektor unggulan dan masalah penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dilakukan mengingat bahwa Propinsi DIY yang relatif sempit yaitu dengan luas 3.185,80 km², sementara sumberdaya yang ada terutama sumberdaya alam relatif terbatas sedangkan jumlah penduduk yang ada dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan data statistik, pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta periode waktu 1997-2000 rata-rata sebesar 5,54% per tahun, lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya. hal tersebut terjadi akibat adanya krisis ekonomi yang secara langsung berpengaruh terhadap pendapatan masing-masing sektor perekonomian terutama sektor industri dan perdagangan maupun jasa. Jika dibandingkan antar Kabupaten dan Kota, ternyata Kota Yogyakarta memiliki pertumbuhan rata-rata paling tinggi (7,05% per tahun) melebihi pertumbuhan rata-rata propinsi DIY. Sedangkan untuk Kabupaten Bantul. Kulon
Progo dan Gunung Kidul masing-masing memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 4,54% per tahun, 4,54% per tahun, dan 4,54% per tahun.

Yogyakarta ternyata masih menemui kendala terutama karena tambahan jumlah lapangan kerja atau kesempatan kerja tidak sebanding dengan bertambahnya tenaga kerja. Berdasarkan data ketenagakerjaan jumlah tenaga kerja pada tahun 1997 sebesar 2.368.074 orang meningkat menjadi 2.443.389 orang pada tahun 2000 atau naik 0,05% rata-rata per tahun. Sedangkan jumlah angkatan kerja yang bekerja sebesar 1.528.609 orang pada tahun 2000 dengan kesempatan kerja sebesar 6.480 orang per tahun. Rendahnya tingkat pertumbuhan kesempatan kerja menyebabkan tingkat pengangguran terbuka tinggi. Jika dirinci menurut sektor perekonomian ternyata di Daerah Istimewa Yogyakarta sektor pertanian masih menduduki urutan pertama, kemudian sektor perdagangan, jasa dan industri BPS, 2001)

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan di Propinsi DIY, dan
2. perkembangan sektor perekonomian dan tingkat penyerapan tenaga kerja antar daerah di Propinsi DIY

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan daerah adalah pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat, dilaksanakan pada semua aspek kehidupan rakyat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Fokus utama pembangunan tersebut adalah pada sektor-sektor perekonomian yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Mubyarto, 2000). Pemanfaatan potensi daerah secara optimal dan terpadu merupakan syarat yang perlu diperhatikan agar kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat tercapai. Penggunaan sumberdaya alam yang terus perlu dijaga kelestariaannya karena merupakan modal utama dan fundamental untuk pelaksanaan aktivitas pembangunan yang secara umum bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu sumberdaya manusia juga merupakan unsur pendukung utama dalam proses pengembangan wilayah. Menurut Geertz sumberdaya manusia di pedesaan Jawa dalam perkembangannya mengalami proses involusi karena ada pengaruh sistem sosial yang mendua. Sumberdaya manusia wilayah jangan hanya diperlakukan sebagai pelaku (faktor produksi) semata, tetapi perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan, evaluasi dan penilaian (Effendi, 1996).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat diketahui dari meningkatnya output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang memadai selalu ditargetkan oleh setiap pemerintah daerah karena dua alasan : (1) jumlah penduduk yang selalu bertambah, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk jika tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah PDRB maka kesejahteraan rakyat menurun; (2) pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kualitas kehidupan ekonominya di masa datang

ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari waktu sebelumnya. Hasil penelitian Sjafrizal (1997) di wilayah Indonesia Bagian Barat menunjukkan bahwa dalam periode 1987-1995 perkembangan pembangunan regional lebih baik dari rata-rata keadaan seluruh Indonesia. Kondisi tersebut dilihat baik dari segi pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7-8,5% setiap tahun untuk setiap propinsi maupun pemerataan pembangunan wilayah yang ketimpangannya relatif rendah.

Nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian dalam satu tahun dapat digambarkan oleh nilai pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi tercermin pada kenaikan pendapatan nasional dari tahun ke tahun, hal tersebut analog dengan laju pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat dari perkembangan PDRB. Dengan menganalisis PDRB secara keseluruhan dapat diketahui sektor unggulan di masa lalu dan kemudian dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam membuat perencanaan pembangunan secara makro yang lebih baik di masa yang akan datang. Salah satu cara pendekatan perencanaan pada model ekonomi regional yaitu sektor unggulan atau sektor basis (*economic base*).

Sektor unggulan ini merupakan sektor yang mempunyai prospek yang baik dan dapat dikembangkan terhadap peningkatan perekonomian daerah kabupaten/kota atau sektor yang memenangkan persaingan dengan sektor lain yang dapat dilihat dari sumbangan setiap sektor pada PDRB atas dasar harga konstan dalam suatu daerah (Arsyad, 1999). Sektor unggulan dalam analisis lanjutan penting untuk menentukan pola kebijakan pembangunan regional. Adanya sektor unggulan pada suatu daerah tertentu berimplikasi pada adanya dukungan sumberdaya manusia yang melimpah, sehingga daerah tersebut mempunyai keunggulan komparatif yang tinggi pada suatu sektor tertentu. Dengan melihat sektor unggulan sebagai komoditi ekspor daerah lain dapat diperoleh pola hubungan keterkaitan antar wilayah serta potensi pengembangan untuk masing-masing wilayah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adora (2000) menunjukkan bahwa sektor unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat adalah sektor pertambangan dan galian serta perdagangan/restoran dan hotel. Sedangkan sub sektornya adalah pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta perdagangan besar dan eceran. Untuk mengembangkan sektor pariwisata di Propinsi Bali sektor yang sub sektornya menjadi unggulan adalah sub sektor perhotelan (11,8%) dan terendah (0,8%) adalah sub sektor rekreasi (Sudiarditha, 2001). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muchdie (2000) menunjukkan bahwa sektor perkebunan, pertambangan dan perikanan mempunyai indeks kompetisi yang tergolong kuat. Sementara sektor industri, sektor perdagangan mempunyai indeks kompetensi inti yang tergolong lemah.

Pertumbuhan PDRB suatu wilayah harus mempertimbangkan kondisi atau keadaan jumlah penduduk yang ada, terutama pada sektor ketenagakerjaan baik dari segi kualitas

diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja, sedangkan secara kualitas angkatan kerja yang berpendidikan rendah masih cukup banyak. Malthus mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk akan menaikkan kesejahteraan jika pertumbuhan penduduk akan menaikkan permintaan efektif yang berarti akan mendorong produsen memproduksi sesuai skala produksi dan penawaran tenaga kerja yang murah guna mencapai output yang lebih tinggi.

Penyerapan tenaga kerja ditentukan oleh jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk, struktur umur tenaga kerja, tingkat penghasilan, motivasi dan etos kerja, pendidikan dan latihan serta berbagai macam kebijakan pemerataan, yang masing-masing berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu bagian dari partisipasi pembangunan. Adanya penyerapan tenaga kerja yang cukup maka dapat menggambarkan besarnya kesediaan usaha produksi dengan mempekerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan. Besarnya ketersediaan diukur dengan penyediaan tenaga kerja.

Penelitian yang dilakukan Sudiarditha (2001) menunjukkan bahwa berkembangnya sub sektor pariwisata mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 1% sedangkan untuk sub sektor lainnya kurang dari 1% sehingga kondisi tersebut dapat mengatasi masalah pengangguran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suhandoyo (2000) di daerah Kawasan Ekonomi Terpadu Batulicin Propinsi Kalimantan Selatan menunjukkan sebagian besar laju produktivitas mengalami penurunan karena laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja lebih cepat dari laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang rendah (40,3%). Kondisi tersebut diperburuk dengan sebagian angkatan kerja yang berpendidikan tamat SD atau kurang (65,9%) dan angkatan kerja yang bekerja sebagian di sektor pertanian, perdagangan dan jasa serta industri berstatus pekerja non formal dengan produktivitas rendah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan data sekunder yang merupakan bahan utama, terutama dalam menganalisis sektor unggulan yaitu berupa data PDRB dan data ketenagakerjaan secara *times series* (1993-2002). Lokasi penelitian dipilih secara purposive sampling di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertimbangannya adalah Propinsi DIY merupakan propinsi yang relatif sempit dengan keterbatasan sumberdaya alam yang tersedia sementara jumlah penduduk cukup banyak. Selain itu antara kabupaten atau kota memiliki variasi potensi sumberdaya, sehingga perlu dikaji potensi antar sektor perekonomian yang ada.

Setelah seluruh informasi yang diperoleh dari data sekunder terjaring selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan dituangkan dalam bentuk tabel maupun peta. Berdasarkan tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor

$$LQ = \frac{Y_{ij}/Y_j}{Y_i/Y}, \text{ dimana :}$$

Y_{ij} : PDRB dari sektor-sektor pada daerah/kota ke j

Y_j : PDRB di daerah kabupaten/kota ke j

Y_i : PDRB propinsi dari sektor i

Y : PDRB propinsi

Jika $LQ > 1$, artinya daerah yang bersangkutan mempunyai sektor unggulan dan jika $LQ < 1$ maka daerah tersebut tidak mempunyai basis dalam sektor yang bersangkutan.

Untuk menjelaskan tujuan kedua dalam penelitian ini yaitu mengetahui perkembangan sektor perekonomian digunakan analisis shift share (Glasson, 1997):

$$G_{ij} = N_{ij} + P_{ij} + D_{ij}, \text{ dimana :}$$

G_{ij} : Pertumbuhan PDRB sektor i pada daerah ke j yang dinyatakan dalam rupiah

N_{ij} : Pertumbuhan PDRB sektor i pada daerah ke j yang persentase pertumbuhannya sama dengan tingkat propinsi dan dinyatakan dalam rupiah

P_{ij} : Nilai tambah sumbangan dari sektor i pada daerah ke j yang dinyatakan dalam rupiah

D_{ij} : Pertumbuhan PDRB sektor i pada daerah ke j yang persentase pertumbuhannya lebih cepat atau lebih lambat dari sektor yang sama ditingkat propinsi dan dinyatakan dalam rupiah

Sedangkan untuk mengetahui tingkat penyerapan tenaga kerja digunakan analisis

(a) uji produktivitas penyerapan tenaga kerja (Simanjuntak, 1995): $P = Q/L$, dimana :

P : Produktivitas tenaga kerja

Q : Produktivitas PDRB

L : Penyerapan tenaga kerja

(b) laju pertumbuhan produktivitas, $P = (1+g)/(1+n)$, dimana :

P : laju pertumbuhan produktivitas

G : laju pertumbuhan PDRB

N : laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja

(c) p elastisitas penyerapan tenaga kerja : $E = \% \Delta n / \% \Delta g$, dimana :

E : Elastisitas penyerapan tenaga kerja

$\% \Delta n$: Perubahan penyerapan tenaga kerja

$\% \Delta g$: Perubahan PDRB

Keterangan:

Elastisitas kurang dari satu berarti laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja ($E < 1$) sedangkan elastisitas lebih besar dari satu berarti laju pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari laju pertumbuhan penyerapan tenaga

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Sektor Unggulan

Penentuan sektor ekonomi dalam kategori sektor unggulan atau non unggulan digunakan analisis dengan metode identifikasi per sektor pada setiap kabupaten. Hal tersebut didekati dengan menggunakan metode LQ (*Location Quotient*). Suatu sektor dikatakan sebagai sektor unggulan jika nilai LQ lebih dari satu dan yang termasuk sektor non unggulan adalah jika LQ kurang dari satu.

Perkembangan pada sektor-sektor perekonomian dapat dilihat pada nilai LQ setiap tahunnya. Perkembangan dihitung dari selisih LQ pada tahun 1993 dengan LQ pada tahun 2001. Tanda positif (+) dan negatif (-) memberi pengertian bahwa selama tahun 1993 - 2001 terjadi pergeseran sektoral yang menyangkut terjadinya proses semakin besar atau semakin kecilnya proporsi sektor unggulan maupun non unggulan di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 1 menunjukkan bahwa di Kabupaten Kulon Progo sektor pertanian dan jasa menjadi sektor unggulan dari tahun 1993-2001, walaupun terjadi perkembangan yang fluktuatif pada kedua sektor tersebut. Jika dilihat selisih LQ antara tahun 1993-2001 untuk sektor pertanian proporsinya kecenderungan meningkat, sedangkan sektor jasa proporsinya semakin kecil. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan nilai negatif pada sektor jasa.

Sektor bangunan dan industri pengolahan mempunyai kecenderungan proporsi yang semakin menurun. Artinya sektor ini kemungkinan untuk dikembangkan agak sulit terutama untuk mendukung pembangunan daerah. Kondisi yang berbeda terjadi pada sektor listrik. Gas dan air bersih; perdagangan; hotel dan restoran; serta sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki prospek yang cukup baik di masa yang akan datang, hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan nilai LQ dari tahun 1993-2001. Jika pemerintah daerah mengoptimalkan atau memprioritaskan sektor-sektor tersebut kemungkinan pada suatu saat akan menjadi sektor unggulan di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan pengelompokan sektor produksi maka sektor primer dan sebagian sektor tersier yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan sektor sekunder termasuk sektor non unggulan.

Hasil perhitungan LQ di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa sektor pertanian, pertambangan dan galian, industri pengolahan, bangunan dan perdagangan, hotel, restoran termasuk dalam sektor unggulan. Jika dilihat perkembangan nilai LQ dari tahun 1993 sampai tahun 2001 ternyata hanya sektor pertanian dan bangunan yang nilai LQ nya selalu lebih dari 1. Hal tersebut berarti bahwa kedua sektor tersebut menjadi sektor unggulan untuk setiap tahunnya, dengan kecenderungan proporsi yang semakin meningkat. Secara keseluruhan di Kabupaten Bantul semua sektor produksi menjadi sektor unggulan baik sektor primer, sekunder maupun tersier. Perkembangan analisis LQ per sektor di Kabupaten Gunung Kidul antara tahun 1993 sampai 2001 mempunyai kecenderungan untuk meningkat, kecuali pada sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu dari nilai LQ 0,87 pada tahun 1993

Tabel 1. Analisis LQ Propinsi

LAPANGAN USAHA	KABUPATEN KULON PROGO									
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Selesih 93-01
Pertanian	1.56	1.56	1.64	1.7	1.75	1.81	1.73	1.59	1.74	+
Pertambangan dan penggalian	1.15	1.41	1.10	1.04	0.79	0.87	0.82	0.89	0.84	-
Industri pengolahan	0.42	0.39	0.39	0.42	0.48	0.36	0.72	0.32	0.33	-
Listrik, gas dan air bersih	0.50	0.58	0.60	0.62	0.60	0.70	0.81	0.77	0.80	+
Bangunan	0.88	0.89	0.95	0.96	0.93	1.09	0.81	0.93	0.81	-
Perdagangan, hotel dan restoran	0.84	0.88	0.93	0.94	0.58	0.85	0.96	0.94	0.93	+
Pengangkutan dan komunikasi	0.80	0.85	0.90	0.93	0.93	0.89	1.05	0.98	0.90	+
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	0.60	0.59	0.60	0.58	0.58	0.62	0.70	0.72	0.71	+
Jasa-jasa	1.30	1.29	1.17	1.10	1.11	1.06	1.13	1.14	1.15	-
LAPANGAN USAHA	KABUPATEN BANTUL									
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Selish 93-01
Pertanian	1.25	1.26	1.28	1.28	1.27	1.25	1.27	1.20	1.27	+
Pertambangan dan penggalian	0.98	0.97	0.97	0.98	1.00	0.92	0.95	0.98	1.09	+
Industri Pengolahan	0.95	0.96	0.96	1.00	1.04	1.03	1.05	1.15	1.14	+
Listrik, gas dan air bersih	0.61	0.86	0.87	0.54	0.56	0.71	0.65	0.62	0.69	+
Bangunan	1.11	1.11	1.13	1.13	1.12	1.28	1.28	1.27	1.26	+
Perdagangan, hotel dan restoran	1.01	1.03	1.02	1.01	0.99	1.03	1.04	1.04	1.03	+
Pengangkutan dan Komunikasi	0.90	0.86	0.85	0.85	0.86	0.75	0.74	0.68	0.62	-
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	0.58	0.57	0.58	0.60	0.60	0.60	0.61	0.59	0.60	+
Jasa-jasa	0.99	0.99	0.95	0.97	0.97	0.97	0.96	0.98	0.99	+
LAPANGAN USAHA	GUNUNG KIDUL									
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Selesih 93-01
Pertanian	2.03	2.05	2.08	2.09	2.06	2.06	2.21	2.07	2.14	+
Pertambangan dan penggalian	1.14	1.15	1.28	1.30	1.30	1.43	1.46	1.49	1.56	+
Industri pengolahan	0.81	0.83	0.84	0.87	0.89	0.87	0.84	0.90	0.90	+
Listrik, gas dan air bersih	0.27	0.30	0.34	0.34	0.36	0.34	0.31	0.30	0.31	+
Bangunan	0.97	0.97	0.99	0.98	0.97	1.07	1.03	1.01	0.99	+
Perdagangan, hotel dan restoran	0.64	0.66	0.66	0.67	0.67	0.69	0.67	0.67	0.65	+
Pengangkutan dan komunikasi	0.87	0.91	0.91	0.91	0.91	0.89	0.88	0.83	0.76	-
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	0.80	0.79	0.79	0.77	0.79	0.75	0.74	0.75	0.81	+
Jasa-jasa	0.80	0.79	0.79	0.77	0.79	0.75	0.74	0.75	0.81	-

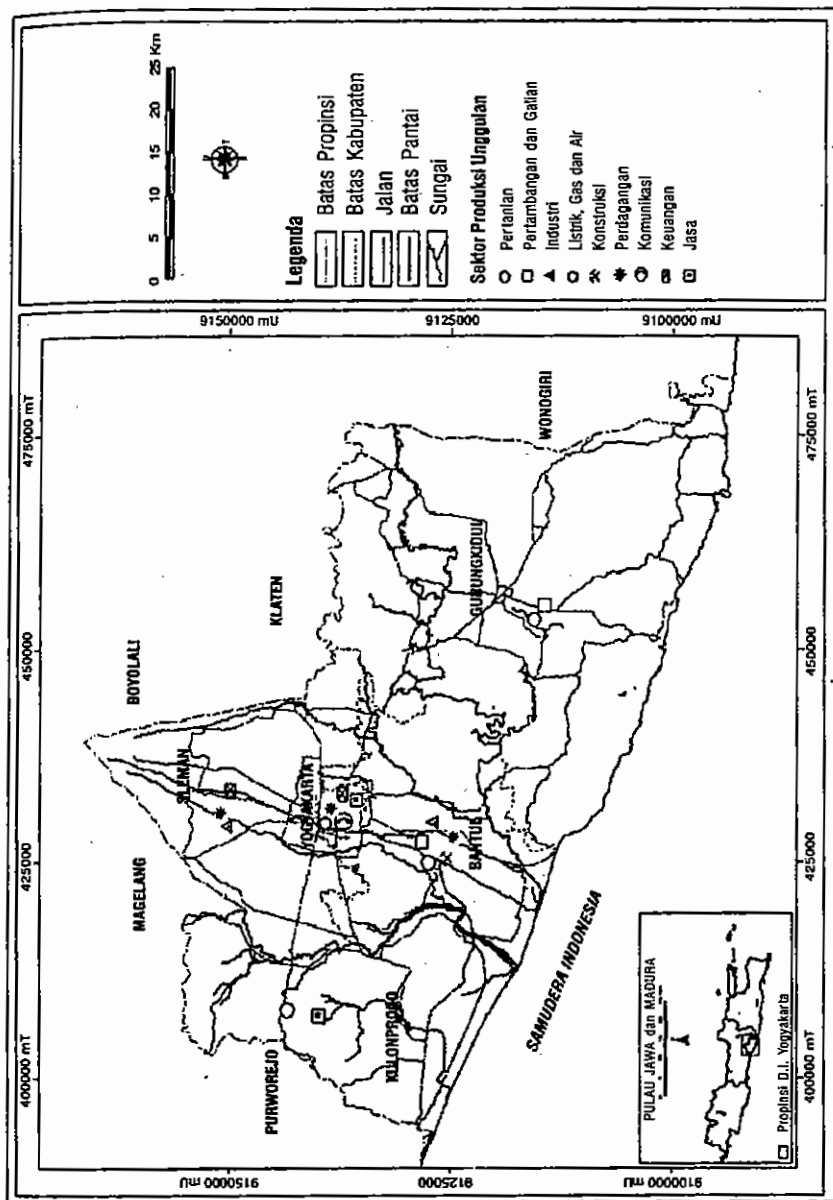
Lanjutan Tabel 1										
LAPANGAN USAHA	KABUPATEN SLEMAN									
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Selisih 93-01
Pertanian	0.90	0.89	0.88	0.88	0.89	0.72	0.78	0.78	0.82	-
Pertambangan dan Penggalian	0.44	0.42	0.38	0.38	0.36	0.33	0.34	0.36	0.37	-
Industri Pengolahan	1.16	1.20	1.21	1.21	1.18	1.15	1.12	1.22	1.25	-
Listrik, gas, dan air bersih	0.85	0.87	0.88	0.94	0.90	1.07	0.96	0.93	0.92	+
Bangunan	1.14	1.15	1.15	1.17	1.17	1.34	1.32	1.29	1.28	+
Perdagangan, hotel dan restoran	1.09	1.06	1.06	1.05	1.08	1.16	1.15	1.16	1.13	+
Pengangkutan dan komunikasi	0.95	0.91	0.93	0.93	0.95	0.96	0.94	0.88	0.82	-
Kuangan, persewaan dan jasa perusahaan	1.19	1.20	1.16	1.14	1.12	1.13	1.13	1.10	1.10	-
Jasa-jasa	0.81	0.82	0.82	0.82	0.82	0.85	0.84	0.85	0.86	+
LAPANGAN USAHA	KOTA YOGYAKARTA									
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Selisih 93-01
Pertanian	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	-
Pertambangan dan penggalian	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	-
Industri pengolahan	0.84	0.80	0.80	0.78	0.78	0.81	0.79	0.84	0.87	+
Listrik, gas dan air bersih	2.28	2.03	1.95	2.08	2.00	2.01	1.80	1.76	1.75	-
Bangunan	0.89	0.89	0.86	0.85	0.83	0.77	0.75	0.75	0.73	-
Perdagangan, hotel dan restoran	1.26	1.27	1.26	1.25	1.27	1.28	1.26	1.31	1.28	+
Pengangkutan dan komunikasi	1.33	1.37	1.34	1.34	1.35	1.42	1.41	1.35	1.28	-
Kuangan, persewaan dan jasa perusahaan	1.72	1.70	1.72	1.71	1.71	1.57	1.57	1.59	1.57	-
Jasa-jasa	1.29	1.28	1.26	1.27	1.26	1.30	1.29	1.29	1.30	+

Sumber : Pengolahan data sekunder

Sektor pertambangan dan penggalian juga menjadi sektor unggulan untuk setiap tahunnya dengan proporsi yang terus meningkat. Berdasarkan sektor produksi di Kabupaten Gunung Kidul hanya pada sektor primer yang menjadi sektor unggulan.

Berbeda dengan tiga kabupaten sebelumnya, untuk Kabupaten Sleman ternyata sektor pertanian sudah tidak menjadi sektor unggulan antara tahun 1993-2001. Kondisi ini disebabkan oleh kenyataan bahwa alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman paling tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Alih fungsi lahan tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan permukiman, sarana pendidikan maupun sarana sosial lainnya. Sehingga jika dilihat nilai LQ nya untuk sektor pertanian proporsinya semakin menurun dari tahun ke tahun. Sektor unggulan di Kabupaten Sleman adalah sektor bangunan, Industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Masing-masing sektor mempunyai kecenderungan meningkat nilai LQ-nya untuk setiap tahunnya, kecuali pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Berdasarkan pembagian sektor produksi di Kabupaten Sleman untuk sektor sekunder dan sektor tersier yang menjadi sektor unggulan, sedangkan sektor primer tidak menjadi sektor unggulan.

Terdapat lima sektor yang menjadi sektor unggulan di Kota Yogyakarta, yang paling tinggi adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dengan nilai LQ 1,75 pada tahun 2001. Pada sektor ini pernah mencapai LQ lebih dari dua yaitu pada tahun 1993-1998. Artinya bahwa sektor ini selain mampu mencukupi kebutuhan bagi masyarakat kota Yogyakarta juga mampu mensuplai untuk luar Kota Yogyakarta. Sektor lain yang menjadi unggulan adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; jasa; pengangkutan dan komunikasi serta perdagangan, hotel dan restoran. Sektor jasa dan perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor unggulan yang memiliki kecenderungan untuk selalu meningkat, sedangkan pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; pengangkutan dan komunikasi proporsinya terus menurun antara tahun 1993-2001. Sektor produksi sekunder dan tersier yang menjadi sektor unggulan di Kota Yogyakarta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1, pada peta tersebut digambarkan sektor-sektor perekonomian yang ada di setiap kabupaten di Propinsi DIY yang menjadi unggulan.



Gambar 1. Peta Sektor Produksi Unggulan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

B. Analisis Shift-Share

Hasil analisis shift-share pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai G yang merupakan pertumbuhan total PDRB yang dihitung secara absolut untuk tiap kabupaten berdasarkan lapangan usaha persektor. Dari hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi antara tahun 1993-2001 hampir semua kabupaten mengalami pertumbuhan PDRB kecuali pada Kabupaten Kulon Progo yaitu -39.803. Hal tersebut terjadi karena rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo pada sektor pertanian, pertambangan dan galian; industri; bangunan dan jasa bernilai negatif (mengalami penurunan) yang cukup tinggi. Kabupaten Sleman memiliki pertumbuhan PDRB yang paling tinggi.

Nilai N adalah pertumbuhan PDRB pada masing-masing Kabupaten/Kota yang persentase pertumbuhannya sama dengan pertumbuhan PDRB daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai G-N adalah selisih pertumbuhan PDRB untuk masing-masing kabupaten/kota dengan pertumbuhan PDRB pada setiap kabupaten/kota persentasenya sama dengan pertumbuhan PDRB propinsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang lambat jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk Kabupaten Gunung Kidul justru memiliki nilai yang paling tinggi (9872,61) jika dibandingkan dengan ke empat daerah yang lain. Hal tersebut terjadi adanya faktor internal di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu pemanfaatan sumberdaya manusia terutama di sektor jasa yang bekerja di luar Kabupaten.

P+D merupakan penambahan antara dua komponen 'shift'. Shift merupakan penyimpangan (*deviation*) dari komponen National Share (N) dalam pertumbuhan PDRB. Penyimpangan yang nilainya positif (+) terjadi pada daerah yang tumbuh dengan baik, sedangkan yang bernilai negatif digolongkan pada daerah yang kurang maju. Untuk mengetahui seberapa penyimpangan pada masing-masing daerah perlu memperhatikan masalah *proportionality shift componen* (P) yang dikenal sebagai komponen struktural. Komponen ini mengukur besarnya shift kabupaten/kota yang diakibatkan oleh komposisi setiap sektor pada daerah yang bersangkutan. Nilai P dapat positif maupun negatif, nilai positif artinya kabupaten/kota tersebut berpotensi dalam sektor-sektor secara regional (propinsi) tumbuh dengan cepat. Bernilai negatif di kabupaten/kota yang mempunyai potensi dalam sektor-sektor yang secara regional tumbuh dengan lambat.

Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul mempunyai nilai pertumbuhan per sektor yang negatif. Artinya daerah-daerah tersebut berpotensi pada suatu sektor dimana sektor tersebut pertumbuhan rata-rata propinsi lambat. Sedangkan di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki nilai P yang positif, yang artinya rata-rata pertumbuhan setiap sektor di kedua daerah tersebut lebih cepat dari pertumbuhan rata-rata propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nilai P juga menunjukkan pengaruh yang bersifat eksternal yaitu pengaruh dari luar daerah yang bersangkutan. Sehingga kemungkinan besar untuk Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta pengaruh dari luar daerah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan

antar kabupaten (Daerah Istimewa Yogyakarta) maupun dari luar propinsi. Kondisi tersebut sangat relevan karena melihat perkembangan Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pariwisata maupun kota pelajar menunjukkan banyak para migran yang datang di Kota Yogyakarta dan ke Kabupaten Sleman. Adanya migran tersebut berpengaruh terhadap perkembangan Kota Yogyakarta maupun efek sekunder ke Kabupaten Sleman.

Pertumbuhan suatu sektor bukan hanya dilihat dari pengaruh eksternal saja, akan tetapi tergantung pula pada kondisi lokal daerah secara intern. Sehingga selain nilai P, nilai D (*Differential Shift Component*) juga diperhatikan yang dikenal sebagai komponen lokasional. Pada komponen ini mengukur besarnya 'shift' regional netto yang diakibatkan oleh sektor-sektor tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat pada daerah yang bersangkutan daripada tingkat propinsi yang disebabkan oleh faktor lokasional intern. Suatu daerah yang mempunyai keuntungan lokasional seperti sumberdaya yang baik maka akan mempunyai '*differential shift component*' yang positif. Sedangkan yang secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai komponen yang negatif. Sehingga apabila suatu daerah memiliki nilai D positif (+) maka rata-rata PDRB persektor daerah tersebut tumbuh lebih cepat dari rata-rata PDRB propinsi, sedangkan yang bernilai negatif pertumbuhannya lebih lambat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara internal ke empat daerah di Propinsi DIY menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonominya tergolong lebih cepat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi di Propinsi DIY. Sedangkan untuk Kabupaten Kulon Progo nilainya negatif (lihat tabel 2), artinya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut lebih lambat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi di DIY.

Tabel 2. Analisis Shift-Share di Daerah Istimewa Yogyakarta

KABUPATEN/KOTA	GJ	NJ	(P+D)J	PJ	DJ
1. Kulon Progo	-39803	101131.90	-140934.90	-10179.39	-130755.37
2. Bantul	170118	177691.62	-7573.62	-10143.52	2570.14
3. Gunung Kidul	199983	190110.38	9872.61	-288826.72	38699.60
4. Sleman	37070700	288400.90	82299.09	2755.77	79543.71
5. Yogyakarta	329603	270527.98	59075.01	47487.39	11587.98

Sumber : Pengolahan data Sekunder

C. Perkembangan Sektor-Sektor Perekonomian di DIY

Hasil analisis Shift-Share untuk tiap sektor di Propinsi DIY dapat dilihat pada tabel 3. Dari kesembilan sektor perekonomian di Kabupaten Kulon Progo hanya sektor listrik, gas dan air bersih yang mempunyai nilai positif. Artinya sektor ini memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dari rata-rata pertumbuhan perekonomian di DIY. Sedangkan sektor-sektor yang bernilai negatif adalah sektor pertanian; pertambangan dan galian; industri pengolahan; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi.

mengoptimalkan pada semua sektor perekonomian yang bernilai negatif agar perkembangan perekonomian bisa lebih cepat sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dengan dukungan perekonomian yang kuat pada setiap sektor. Jika dilihat pertumbuhan persektor untuk pengangkutan dan komunikasi pertumbuhannya paling lambat dari ke 9 sektor lainnya yaitu -9952,44 (lihat tabel 3)

Tabel 3. Rata-rata Pertumbuhan Sektor Perekonomian di DIY

LAPANGAN USAHA	RATA-RATA PERTUMBUHAN SEKTOR PEREKONOMIAN DI DIY (DJ)				
	Kab KulonProgo	Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta
1. Pertanian	-26681,04	1246,06	20935,54	-9029,14	-6453,03
2. Pertambangan dan Penggalian	-3186,12	991,36	4850,81	-896,21	-190,11
3. Industri Pengolahan	-11653,05	20544,19	11313,93	30518,73	12400,24
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	278,96	488,78	319,18	1373,02	-4503,01
5. Bangunan	-1172,62	9826,94	2381,81	24032,86	-13506,99
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	-14170,00	1215,04	3143,12	24038,44	16896,38
7. Pengangkutan dan Komunikasi	-9952,44	-32249,72	-12284,31	-15341,76	407,63
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	-5053,73	1596,90	4682,51	-3058,65	-11618,02
9. Jasa-jasa	-48365,30	-1089,44	3356,97	27906,43	18154,92

Sumber : Pengolahan data sekunder

Hampir semua sektor di Kabupaten Bantul pertumbuhannya positif, kecuali sektor pengangkutan dan komunikasi. Secara absolut sektor industri pengolahan memiliki tingkat pertumbuhan yang paling tinggi (205,44), kemudian sektor bangunan (9826,94) dan pertambangan dan penggalian sebesar 991,36. Seperti halnya di Kabupaten Bantul, untuk Kabupaten Gunung Kidul hampir semua sektor juga mengalami pertumbuhan yang positif, melebihi rata-rata pertumbuhan perekonomian persektor di DIY terkecuali sektor pengangkutan dan komunikasi (-12284,31). Sektor pertanian paling tinggi pertumbuhannya (20935,54), kemudian sektor pertambangan dan galian (4850,81). Sektor industri pengolahan memiliki pertumbuhan positif akan tetapi nilainya paling rendah.

Terdapat 5 sektor dari 9 sektor perekonomian yang pertumbuhannya positif di Kabupaten Sleman. Ke lima sektor tersebut adalah industri pengolahan; listrik, gas dan air minum; bangunan; perdagangan, hotel restoran dan sektor jasa. Artinya bahwa sektor-sektor tersebut pertumbuhannya lebih cepat dari rata-rata pertumbuhan persektor untuk propinsi DIY. Sektor industri pengolahan paling tinggi pertumbuhannya, sedangkan listrik, gas dan air minum pertumbuhannya paling rendah bagi sektor yang bernilai positif. Sektor pertanian; pertambangan dan galian; pengangkutan dan komunikasi; keuangan dan jasa perusahaan lebih rendah daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi propinsi DIY. Sektor pengangkutan dan komunikasi paling rendah (-15341,76) kemudian sektor pertanian (-9029,14)

sektor industri pengolahan; pengangkutan dan komunikasi; perdagangan dan jasa, dengan kontribusi terbesar adalah pada sektor pertanian, pertambangan dan galian; listrik, gas dan air minum; bangunan; dan keuangan pertumbuhannya lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan perekonomian di DIY. Sektor bangunan di kota Yogyakarta pertumbuhannya paling rendah dibandingkan dengan sektor lainnya (-13506,99).

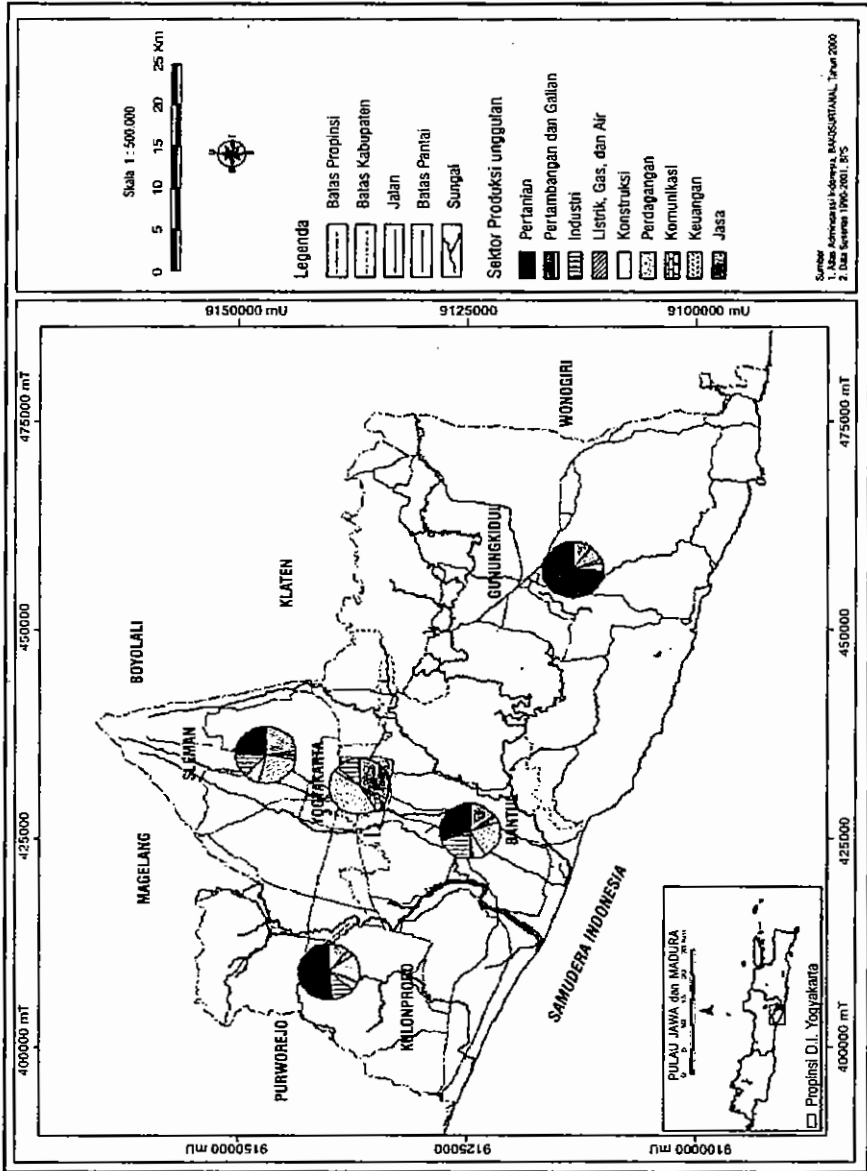
D. Penyerapan Tenaga Kerja dan Laju Produktivitas Tenaga Kerja

Antara sektor satu dengan sektor yang lain terjadi perbedaan laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja maupun PDRB. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut akan berakibat pada perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja pada masing-masing sektor. Disamping itu juga akan berakibat pada terjadinya perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya terhadap pendapatan nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo yang paling tinggi adalah di sektor jasa (2,80%), sedangkan sektor pertambangan dan galian (2,58%), sektor listrik, gas dan air bersih pertumbuhan produktivitas tenaga kerjanya negatif (-23,67%). Sektor tersebut pertumbuhannya paling rendah dan satu-satunya sektor yang memiliki pertumbuhan negatif di Kabupaten Kulon Progo. Sebaliknya yang terjadi di Kabupaten Bantul, sektor listrik, gas dan air bersih pertumbuhan produktivitas tenaga kerja paling tinggi (11,30%). Semua sektor perekonomian di Kabupaten Bantul nilainya positif (mengalami peningkatan), untuk sektor pengangkutan dan komunikasi laju pertumbuhannya paling rendah yaitu 1,35% (lihat tabel 4).

Sektor pertambangan dan galian di kabupaten Gunung Kidul laju pertumbuhan produktivitasnya paling rendah (-4,85%) kemudian sektor pengangkutan dan komunikasi (-0,31%). Sektor pertanian laju produktivitasnya paling tinggi (5,68%). Pada kabupaten Sleman untuk sektor listrik, gas dan air bersih laju pertumbuhannya paling tinggi (7,45%) kemudian sektor bangunan (6,80%). Seperti halnya Kabupaten Gunung Kidul untuk sektor pengangkutan dan komunikasi pertumbuhannya paling rendah yaitu -5,50%. Sektor jasa laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja paling rendah (-19,59) di kota Yogyakarta, kemudian sektor pertanian sebesar -1,33%. Sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih laju pertumbuhannya paling tinggi (8,35%).

Pada peta penyerapan tenaga kerja dari ke 9 sektor perekonomian untuk setiap kabupaten di Propinsi DIY bervariasi (lihat Gambar 2). Akan tetapi pada sektor pertanian masih tinggi tenaga kerja yang terserap, terutama pada kabupaten Gunung Kidul yaitu sekitar tiga perempat dari seluruh lapangan kerja, sedangkan di kabupaten kulon progo separonya. Di kota yogyakarta yang paling banyak penyerapan tenaga kerjanya adalah pada sektor perdagangan dan jasa. Sedangkan untuk kabupaten Sleman pada sektor pertanian dan perdagangan hampir sama kurang lebih 25% dari sektor perekonomian yang



Gambar 2. Peta Persentase Penduduk Bekerja Prpinsi daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja

LAPANGAN USAHA	LAJU PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
	Kab.Kulon Progo	Kab. Bantul	Kab.Gunung Kidul	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta
1. Pertanian	0.928	4.275	5.683	0.126	-1.333
2. Pertambangan dan Penggalian	2.587	1.368	-4.854	1.035	2.541
3. Industri Pengolahan	0.836	3.253	2.950	2.550	1.894
4. Listrik, Gass dan air bersih	-23.676	11.301	3.486	7.455	8.350
5. Bangunan	0.356	2.509	3.428	6.806	0.962
6. Perdagangan, hotel dan restoran	1.322	2.316	2.829	2.028	2.117
7. Pengangkutan dan komunikasi	1.511	1.354	-0.314	-5.503	2.926
8. Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan	1.178	1.781	1.607	1.611	1.370
9. Jasa-jasa	2.808	5.221	2.489	2.639	-19.594

Sumber : Pengolahan Data Sekunder

5. Elastisitas

Selain berpengaruh terhadap perbedaan laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, perbedaan laju pertumbuhan Nasional dan kesempatan kerja juga berpengaruh terhadap perbedaan elastisitas masing-masing sektor perekonomian untuk penyerapan tenaga kerja. Nilai elastisitas kesemaptan kerja antara sektor yang satu dengan yang lain berbeda-beda bisa positif maupun negatif. Nilai tersebut tergantung pada kondisi eksternal maupun internal wilayah dalam perekonomian. Adanya peningkatan sumberdaya manusia dengan skill yang baik, peningkatan teknologi, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta kebijakan pemerintah juga akan berpengaruh didalamnya.

Elastisitas kesempatan kerja merupakan perbandingan antara laju pertumbuhan kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan ekonomi. Pada Kabupaten Kulon Progo sektor keuangan dan jasa perusahaan memiliki elastisitas kesempatan kerja yang paling tinggi (9,26%) artinya jika PDRB bertambah dengan satu persen maka kesempatan kerja yang diciptakan untuk sektor perdagangan dan jasa perusahaan adalah 9,26%. Pada sektor industri pengolahan justru terjadi elastisitas yang negatif sebesar -1,53. Artinya jika terjadi penambahan satu persen PDRB maka justru akan terjadi penurunan kesempatan kerja di sektor industri pengolahan sebesar 1.53%. Kondisi tersebut terjadi karena semakin tinggi maju teknologi maka industri bertindak efisien dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. Selain sektor industri, sektor perekonomian yang elastisitasnya negatif adalah sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan.

Pada Kabupaten Bantul nilai elastisitas tenaga kerja yang negatif terjadi pada dua sektor perekonomian yaitu sektor pertanian dan jasa (-0,09% dan -0,026%). Kondisi tersebut berarti jika pada sektor pertanian dan jasa terjadi penambahan satu persen maka kesempatan kerja yang ada pertanian sektor ini akan mengalami penurunan sebesar 0,09% dan pada sektor jasa penurunannya lebih rendah yaitu 0,026%. Sektor pengangkutan dan

dengan adanya penembasan PDRB sebesar satu persen maka kesempatan kerja yang ada di sektor pengangkutan dan komunikasi bertambah sebesar 11.08%.

Tabel 5. Elastisitas Kesempatan Kerja

LAPANGAN USAHA	ELASTISITAS KESEMPATAN KERJA				
	Kab. Kulon Progo	Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta
1. Pertanian	3,862	-0,091	-0,113	-2,603	-0,028
2. Pertambangan dan Penggalian	0,689	3,590	-0,422	-0,500	0,705
3. Industri Pengolahan	-1,534	0,351	0,418	0,581	1,142
4. Listrik, Gas dan air bersih	-0,137	0,027	0,348	0,076	-0,012
5. Bangunan	-0,891	0,458	-0,570	-0,190	2,902
6. Perdagangan, hotel dan restoran	4,827	0,700	0,443	0,966	0,872
7. Pengangkutan dan komunikasi	2,382	11,08	-1,308	-0,476	0,418
8. Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan	9,269	1,349	1,768	1,829	3,244
9. Jasa-jasa	0,723	-0,026	0,573	0,521	-0,335

Sumber : Pengolahan Data Sekunder

Elastisitas kesempatan kerja di Kabupaten Gunung Kidul pada setiap sektor perekonomian yang ada (9 sektor) lebih rendah jika dibandingkan dengan 4 daerah lainnya di DIY. Terdapat empat sektor yang mengalami elastisitas negatif yaitu sektor pertanian; pertambangan dan galian; bangunan; serta pengangkutan dan komunikasi. Sektor keuangan dan jasa perusahaan memiliki elastisitas kesempatan kerja paling tinggi yaitu 1,76% yang berarti jika PDRB bertambah satu persen maka akan terjadi peningkatan kesempatan kerja sebesar 1,76%.

Seperti halnya kabupaten Gunung Kidul, pada kabupaten Sleman juga terdapat empat sektor perekonomian yang memiliki nilai elastisitas yang negatif. Sektor-sektor tersebut adalah : sektor pertanian yang memiliki elastisitas paling rendah, kemudian sektor pertambangan dan galian; sektor bangunan dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Kondisi tersebut berarti dengan adanya peningkatan PDRB sebesar satu persen pada keempat sektor perekonomian tersebut maka justru akan terjadi penurunan kesempatan kerja sebesar presentase dari masing-masing sektor perekonomian tersebut. Sektor keuangan dan jasa perusahaan pada Kabupaten Sleman juga memiliki nilai elastisitas kesempatan kerja yang paling tinggi (1,82%), kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran (0,96%) dan sektor industri pengolahan sebesar 0,58%.

Elastisitas kesempatan kerja di Kota Yogyakarta untuk sektor keuangan dan jasa perusahaan paling tinggi (3,24%), seperti yang terjadi di Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul. Sektor jasa memiliki elastisitas paling rendah (-0,32%), yang berarti adanya peningkatan PDRB sebesar satu persen justru terjadi penurunan sebesar kesempatan kerja di sektor jasa sebesar 0,32%. Sektor perekonomian lain yang memiliki elastisitas

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis LQ seluruh kabupaten/kota di DIY menunjukkan bahwa yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Kulon Progo adalah sektor pertanian dan jasa, sedangkan di Kabupaten Bantul sektor pertanian; pertambangan dan galian; industri pengolahan; bangunan serta sektor perdagangan, hotel, restoran. Di Kabupaten Gunung Kidul terdapat tiga sektor perekonomian yang termasuk unggulan, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan galian serta sektor bangunan. Berbeda dengan 3 kabupaten lainnya, di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sektor pertanian tidak menjadi sektor unggulan. Sektor industri pengolahan; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menjadi sektor unggulan di Kabupaten Sleman. Sedangkan di Kota Yogyakarta sektor listrik, gas dan air bersih; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa. Berdasarkan pengelompokan sektor produksi tidak semua kabupaten/kota sektor primer menjadi sektor unggulan. Di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang menjadi sektor unggulan hanya pada sektor sekunder dan tersier.

Hasil analisis Shift-Share untuk tiap sektor di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa hanya sektor listrik, gas dan air bersih yang mempunyai nilai positif. Artinya sektor ini memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dari rata-rata pertumbuhan perekonomian di DIY. Hampir semua sektor di Kabupaten Bantul pertumbuhannya positif, kecuali sektor pengangkutan dan komunikasi. Seperti halnya di Kabupaten Bantul, untuk Kabupaten Gunung Kidul hampir semua sektor juga mengalami pertumbuhan yang positif, melebihi rata-rata pertumbuhan perekonomian persektor di DIY terkecuali sektor pengangkutan dan komunikasi (-12284,31). Terdapat 5 sektor di Kabupaten Sleman yang pertumbuhannya positif yaitu sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air minum; bangunan; perdagangan, hotel restoran dan sektor jasa.

Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul serta Kabupaten Sleman pada sektor pertanian juga memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB paling tinggi. Sedangkan sektor perekonomian yang menempati urutan pertama dari segi jumlah tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB di Kota Yogyakarta adalah sektor jasa. Elastisitas kesempatan kerja di Kabupaten Kulon Progo pada sektor keuangan dan jasa perusahaan paling tinggi (9,26%). Pada Kabupaten Bantul elastisitas kesempatan kerja yang bernilai negatif terjadi pada dua sektor perekonomian yaitu sektor pertanian dan jasa (-0,09% dan -0,026%). Sedangkan di Kabupaten Gunung Kidul terdapat empat sektor yang mengalami elastisitas negatif yaitu sektor pertanian ; pertambangan dan galian; bangunan serta pengangkutan dan komunikasi. Di Kabupaten Sleman juga terdapat empat sektor perekonomian yang memiliki nilai elastisitas yang negatif, yaitu: sektor pertanian; pertambangan dan galian; sektor bangunan dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Elastisitas kesempatan kerja di Kota Yogyakarta untuk sektor keuangan

B. Saran

Potensi daerah perlu dikembangkan seoptimal mungkin sesuai dengan potensi atau sesuai dengan sektor unggulan yang dimilikinya sehingga mampu memacu pembangunan perekonomian daerah yang berarti memperluas kesempatan kerja atau dapat mengurangi pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adora, Yass, 2000. Identifikasi Sektor dan Sub sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat. *Tesis*. Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada
- Arsyad, Lincolin, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE. Yogyakarta
- Bappeda, 2001. *Laporan Lengkap Neraca Sumberdaya Alam Spasial Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1999/2000*. Yogyakarta
- BPS, 2000. *Produk Domestik Regional Bruto Propinsi DIY*. Statistik Yogyakarta
- Effendi, Tajjudin N., 1996. Pengembangan Wilayah dan Kualitas Sumberdaya Manusia disampaikan pada *Seminar Nasional Strategi Pengembangan Wilayah dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan*, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada 31 Agustus 1996
- Glasson, John, 1997. *Pengantar Perencanaan Regional (Terjemahan Paul Sihotang)* Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. Jakarta
- Mubyarto, 2000. *Pengembangan Wilayah Pembangunan Perdesaan dan Otonomi Daerah. Direktorat Kebijaksanaan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah*. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jakarta
- Muchdie, 2000. *Kompetisi Inti Sektor Unggulan KAPET Manado - Bitung*. Direktorat Kebijaksanaan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jakarta
- Simanjuntak, Pajaman, 1995. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Lembaga Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta
- Sudiarta R, Agus Suman dan Kusnadi, 2001. Analisis Pengembangan Sektor Industri Pariwisata Terhadap Penyebaran Tenaga Kerja dan Pendapatan Rumah Tangga Petani. *Wacana Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Volume 3 no 2 Januari 2001*. Hal 12-23. Program Pasca sarjana Universitas Barwijaya. Malang.
- Syahfrizal, 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. *Prisma Vol 3 No3 hal 27-36*. LP3ES. Yogyakarta
- Widodo EC Bambang, 2003. Refleksi Kritis Terhadap UU No 22 tahun 199 Beberapa Catatan Pokok. *Majalah Dinamika Pembangunan dan Kewirausahaan* Vol. 3 No. 2 2003. Hal 101-106